

**RENSTRA  
PERUBAHAN  
2019-2024**





## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Oleh sebab itu Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai maksud dan tujuan sebagai implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 menjabarkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas bagi Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya lima tahun mendatang. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 ini dapat terlaksana sesuai harapan dan tahapan yang telah dilalui serta memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Kubu Raya, 2022  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya

  
**Anusapati, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660515 198807 1 004



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial .....	6
2.2. Sumber Daya SKPD.....	8
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan .....	10
2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD .....	13
2.3.3. Jenis Pelayanan .....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial .....	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	21
3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial .....	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Sosial .....	24
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	25
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	27
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	29
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2019 – 2024 .....	32
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>59</b>
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	8
Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020 .....	9
Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselonering Tahun 2020 .....	9
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial (Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kubu Raya.....	14
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	26
Tabel 4.2 Nilai SAKIP Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	26
Tabel 4.3 Pelayanan Dasar .....	27
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	30
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	38
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Sesuai KEPMENDAGRI 050-3708	48
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial

7



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dengan mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disamping itu diperlukan juga Dinas Sosial yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Untuk itu penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 dan bersifat indikatif yang secara paralel penyusunan RPJMD juga diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ini dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, dinamika, peluang dan tantangan yang dihadapi 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
5. UU Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang Sosial.

Adapun tujuan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2019-2024.



2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
4. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Bab II        Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III      Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IV      Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab V        Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI      Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII     Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII    Penutup



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dibidang sosial;
- b. Perumusan kebijakan dibidang social;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sosial;
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- g. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial;



2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
  3. Seksi Pembinaan Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan
- d. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana Alam;
  2. Seksi Tuna Sosial, Anak dan Korban NAPZA; dan
  3. Seksi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Orang Terlantar.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

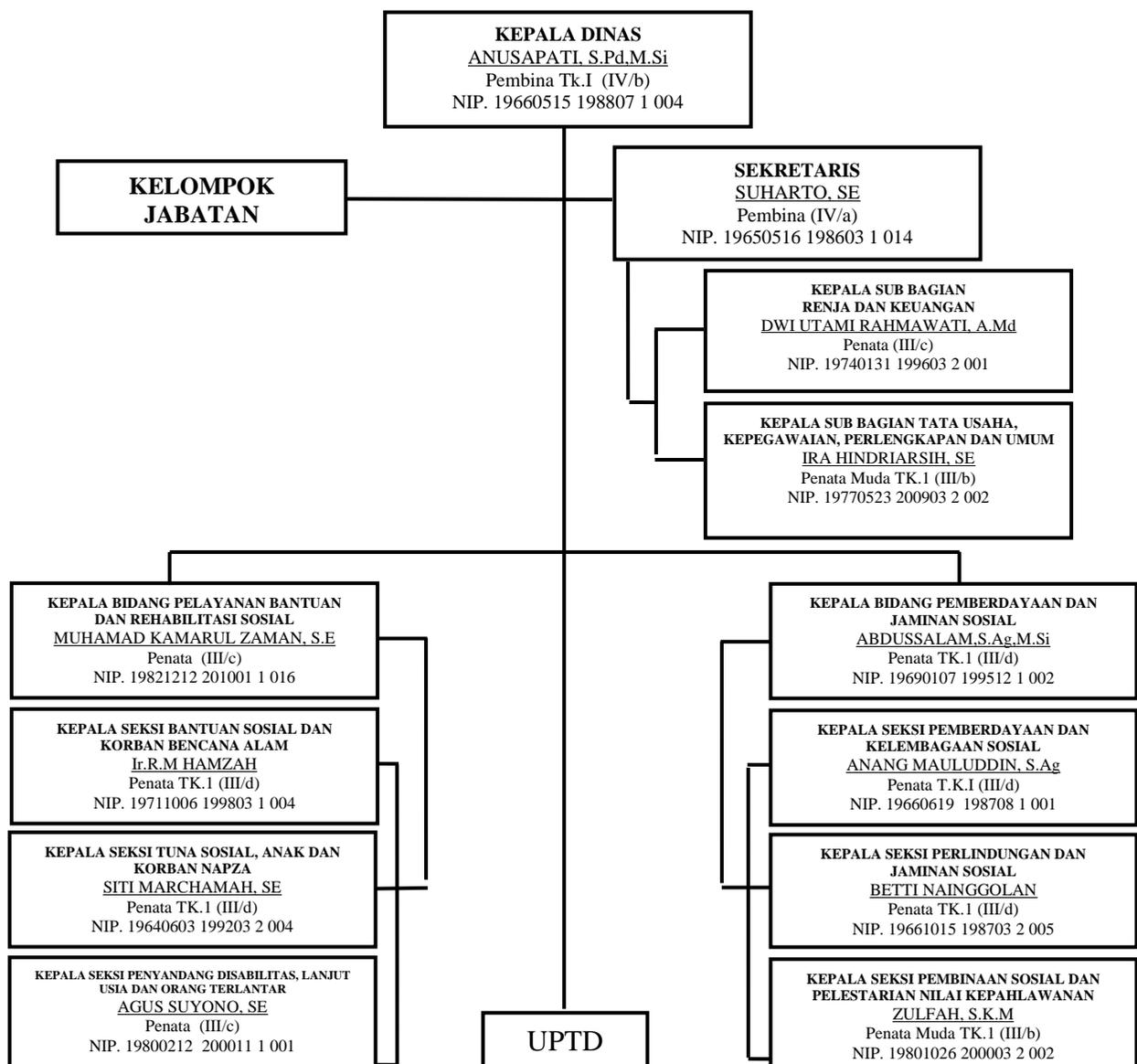
Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

**Gambar 2.1.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**

Nomor : 95 Tahun 2019

Tanggal : 9 Desember 2019





## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Kualitas PNS di suatu SKPD sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**SUMBER DAYA APARATUR**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2021**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	2 orang	9 %
2.	S-1	18 orang	78 %
3.	Diploma	1 orang	4 %
4.	SLTA	2 orang	9 %
5.	SLTP	0 orang	0 %
<b>Jumlah</b>		<b>23 orang</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 adalah Sarjana (S1) 18 orang atau 78% dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) 2 orang yaitu 9%, Diploma (D3) 1 Orang atau 4% dan SLTA sebanyak 2 Orang atau 9% Jadi secara umum sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik pada tahun 2021.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :



**Tabel 2.2**  
**SUMBER DAYA APARATUR**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2021**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	2 orang	9 %
2.	Penata	21 orang	91 %
3.	Pengatur	-	-
4.	Juru	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>23 orang</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 9%, Penata 91%. Selanjutnya sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**SUMBER DAYA APARATUR**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2021**

NO.	ESELON	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	III.b	9 orang	39 %
2.	III.c	4 orang	17 %
3.	III.d	8 orang	35 %
4.	IV.b	1 orang	4 %
5.	IV.c	1 orang	4 %
<b>Jumlah</b>		<b>23 orang</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon III.b sampai



dengan Eselon IV.c dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf teknis di bidang sosial dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 16 orang dengan latar belakang pendidikan Sarjana dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

## **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar yang bertanggungjawab di bidang sosial. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan perencanaan, pembangunan dan penanganan masalah sosial di kabupaten kubu raya yang meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (tahunan), monitoring, pengendalian dan evaluasi.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS), disamping pendekatan partisipatif (participatory planning), disamping itu juga menggunakan pendekatan :

- 1) Politis;
- 2) Teknokratis;
- 3) Partisipatif;
- 4) Atas-Bawah (Top-Down); dan
- 5) Bawah-Atas (Bottom-Up).



Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Melalui pendekatan teknokratik, Dinas Sosial melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan *stakeholders* adalah untuk mendorong partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa yang lebih dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*).

Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan berdasarkan kebutuhan/aspirasi masyarakat, sedangkan perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan perencanaan pemerintah sebagai penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “di atas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”, demikian pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah” juga harus memperhatikan



perencanaan “dari bawah ke atas” yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

- 1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur;
- 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan;
- 3) Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- 4) Penyusunan rancangan akhir Rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

### **2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**

Evaluasi capaian hasil Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang pada struktur organisasi sebelumnya merupakan Bidang yang masih tergabung pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4 berikut :



**Tabel 2.4.**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**

**DINAS SOSIAL (DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Yang Mandiri	-	100%	-	15%	20%	25%	30%	35%	15%	20%	25%	30%	35%	15%	20%	25%	30%	35%



Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Sosial meliputi kapasitas Sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 2) Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 3) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:



**Tabel 2.5**

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**

**DINAS SOSIAL (DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	39.410.000	189.598.000	172.215.150	-	-	35.355.400	189.598.000	36.995.700	-	-	89,71%	100,00%		-	-
2.15.1	Peningkatan kemampuan	-	-	39.410.000	39.098.000	31.278.100	-	-	35.355.400	39.098.000	27.000.000	-	-	89,71%	100,00%	86,32%	-	-



	n (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya																	
2.15.6	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesos)	-	-	-	150.500.000	140.937.050	-	-	-	150.500.000	9.995.700	-	-	-	100,00%	67,08%	-	-
<b>2.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	-	-	-	<b>21.025.000</b>	<b>16.844.300</b>	-	-	-	<b>21.025.000</b>	<b>15.944.300</b>	-	-	-	<b>100,00%</b>	<b>94,66%</b>	-	-
2.16.16	Koordinasi dan	-	-	-	21.025.000	16.844.300	-	-	-	21.025.000	15.944.300	-	-	-	100,00%	94,66%	-	-



	identifikasi lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)																	
<b>2.20</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	-	-	-	<b>35.000.000</b>	<b>27.355.550</b>	-	-	-	<b>35.000.000</b>	<b>19.750.550</b>	-	-	-	<b>100,00%</b>	<b>72,20%</b>	-	-
2.20.7	Pelayanan bagi penderita psykotik terlantar	-	-	-	35.000.000	27.355.550	-	-	-	35.000.000	19.750.550	-	-	-	100,00%	72,20%	-	-
<b>2.21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan</b>	<b>14.999.550</b>	<b>34.742.000</b>	<b>130.037.800</b>	<b>70.741.000</b>	<b>141.095.750</b>	<b>13.532.550</b>	<b>34.731.000</b>	<b>69.780.800</b>	<b>70.741.000</b>	<b>131.307.014</b>	<b>90,22%</b>	<b>99,97%</b>	<b>53,66%</b>	<b>100,00%</b>		<b>36,37%</b>	<b>39,21%</b>



	<b>Kesejahteraan Sosial</b>																	
2.21.8	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan	-	-	46.727.300	45.741.000	42.389.250	-	-	46.018.300	45.741.000	42.264.250	-	-	98,48%	100,00%	99,71%	-	-
2.21.10	Verifikasi, monitoring dan evaluasi penerima hibah/bansos	14.999.550	34.742.000	24.984.500	25.000.000	98.706.500	13.532.550	34.731.000	23.762.500	25.000.000	89.042.764	90,22%	99,97%	95,11%	100,00%	90,21%	<b>10,76%</b>	<b>13,06%</b>
2.21.12	Verifikasi dan Validasi data penerima bantuan iuran (PBI)	-	-	58.326.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.22</b>	<b>Program Keluarga Harapan</b>	-	-	<b>163.881.500</b>	<b>172.400.000</b>	<b>355.658.400</b>	-	-	<b>143.209.500</b>	<b>172.400.000</b>	<b>342.923.400</b>	-	-	<b>87,39%</b>	<b>100,00%</b>		-	-
2.22.1	Monitoring, evaluasi	-	-	-	33.176.000	26.538.400	-	-	-	33.176.000	19.513.400	-	-	-	100,00%	73,53%	-	-



	dan pelaporan program keluarga harapan																	
2.22.3	Bimtek reguler pendamping dan operator PKH	-	-	163.881.500	139.224.000	329.120.000	-	-	143.209.500	139.224.000	323.410.000	-	-	87,39%	100,00%	98,27%	-	-
<b>2.23</b>	<b>Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan</b>	-	-	-	<b>49.850.000</b>	<b>39.880.500</b>	-	-	-	<b>49.850.000</b>	<b>16.780.500</b>	-	-	-	<b>100,00%</b>		-	-
2.23.3	Pelayanan percepatan kepesertaan BPJS	-	-	-	9.850.000	7.881.500	-	-	-	9.850.000	2.381.500	-	-	-	100,00%	30,22%	-	-
2.23.4	Pemulangan gepeng/orang terlantar	-	-	-	40.000.000	31.999.000	-	-	-	40.000.000	14.399.000	-	-	-	100,00%	45,00%	-	-
<b>2.24</b>	<b>Peningkatan Kapasitas</b>	-	-	-	<b>28.500.000</b>	<b>22.797.750</b>	-	-	-	<b>28.500.000</b>	<b>22.797.750</b>	-	-	-	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-



	<b>Pekerja Sosial</b>																	
2.24.6	Bimbingan teknis taruna siaga bencana (TAGANA)	-	-	-	28.500.000	22.797.750	-	-	-	28.500.000	22.797.750	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-



### **2.3.3 Jenis Pelayanan**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi utama Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis yang meliputi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi keuangan dinas.
- 2) Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.
- 3) Penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan sosial.
- 4) Penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- 5) Penyelenggaraan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya masih tinggi.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang kesejahteraan sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial**

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disuatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.



4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih Tingginya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.	Belum Optimalnya Pelayanan Kesejahteraan PMKS	Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
2	Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.	Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.	Sumber Daya Manusia dan anggaran yang masih terbatas menjadi penghambat dalam penjangkauan pelayan



3	Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.	Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.	kurangnya koordinasi dan komunikasi antara sektor satu dan lainnya menyebabkan bantuan yang tumpang tindih
4	Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.	Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu	Kurangnya sosialisasi dan koordinasi melalui organisasi nirlaba
5	Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan	Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial memahami tata cara administrasi perijinan	Kurangnya sosialisai tentang perijinan menjadi penghambat pengajuan bantuan

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam



melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kubu Raya, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024, bahwa Visi Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Daerah terpilih adalah

**“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius ”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).



2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious di seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan Misi pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk pelaksanaannya sesuai tupoksi SKPD, kelima Misi Pembangunan tersebut secara implisit memberikan arahan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk menangani Tugas Sosial terutama pada penekanan Misi ke 2 (Dua) yaitu Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Visi Dinas Sosial dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Adapun program-program pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Perda No 13 Tahun 2019 dimaksud sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
5. Program Keluarga Harapan;
6. Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan;
7. Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial;
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor;
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;



13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Adapun Program yang Sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

### **3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat**

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya khususnya terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2020-2024.

Tujuan dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah mewujudkan Kesejahteraan Sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Sosial**

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religius.

Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah :

1. Rendahnya kepedulian dan komitmen *stakeholders* terkait penataan ruang.
2. Belum terpenuhinya SPM bidang penataan ruang.

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien. Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan, tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial.

Selanjutnya dalam RT/RW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi, peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi, kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.



Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :

1. Strategi pengembangan struktur ruang wilayah.
2. Strategi pengembangan kawasan perdesaan.
3. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan.
4. Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah.
5. Strategi pengembangan pola ruang wilayah.
6. Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.
7. Strategi penataan tata batas desa di 120 desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 sudah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016, sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RT/RW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai, tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

1. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.



3. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menetapkan isu strategis :

1. Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya secara terperinci dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA			TARGET KINERJA		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP	-	CC	B	B	B	A



2	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	2,03 %	87 %	85 %	90 %	100 %
---	--	----------------------------	---	----------------------------	---	--------	------	------	------	-------

**Tabel 4.2.**  
**PELAYANAN DASAR**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REALISASI			TARGET		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	-	100%	70%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	-	44.90%	23%	65%	70%	80%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	-	0.00%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	-	100%	89%	100%	100%	100%



Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mendefinisikan Standar Teknis sebagai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

**Tabel 5.1.**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**

Visi 1	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius						
Misi 2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat						
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial						
	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Meningkatkan Nilai SAKIP pada Unit Kerja	1	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP



Kelola Pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Meningkatkan Penanganan PMKS	1	Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi PMKS
--	---	---	---	---------------------------------	---	--



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial yang diterapkan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

**Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Perda 13 adalah sebagai berikut ;**

**Sasaran Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Penyediaan sewa gedung/kantor/tempat
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

## **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan laporan keuangan semesteran
- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan rencana kerja RKA, DPA dan DPPA
- Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD

## **6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Fasilitasi penataan aset pada SKPD



## **7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
- Penyusunan sistem informasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan

### **Sasaran Kedua : Meningkatnya Daya Saing Daerah**

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil**

**(KAT)** dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan pusat kesejahteraan sosial (puskesos)
- Fasilitasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Fasilitasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan
- Fasilitasi Penanganan Bencana

#### **2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

- Koordinasi dan identifikasi lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)

#### **3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**

- Penanganan dan Pendampingan PMKS
- Pelayanan terhadap eks Penyandang Penyakit Sosial

#### **4. Program Keluarga Harapan**

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan keluarga harapan
- Bimtek reguler pendamping dan operator PKH

#### **5. Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan**

- Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial

#### **6. Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial**

- Bimbingan Teknis Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

**Dan untuk Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019**

**Sasaran Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**



Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Sosial

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

**Sasaran Kedua : Meningkatkan Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat**

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial



Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

## 2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.
- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial.

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

## 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

## 4. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.



5. Program Pengelolaan Taman Makam

Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

7. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dilengkapi dengan Indikator dan Target disajikan pada tabel 6.1 di bawah ini.



**Tabel 6.1.**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar					385.000.000		1.297.000.000		1.297.000.000		1.297.000.000		1.297.000.000		5.573.000.000	Dinas Sosial	KKR
			Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT					9 Kecamatan	50.000.000		9 Kecamatan	250.000.000		9 Kecamatan	250.000.000		9 Kecamatan	250.000.000		9 Kecamatan



			dan PMKS lainnya																
2	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas)	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas)				9 Kecamatan	100.000.000	9 Kecamatan	250.000.000	9 Kecamatan	1.100.000.000	Dinas Sosial	KK R						
3	Fasilitasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah Fasilitasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)				9 Kecamatan	170.000.000	9 Kecamatan	300.000.000	9 Kecamatan	1.370.000.000	Dinas Sosial	KK R						
4	Fasilitasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah Fasilitasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)				9 Kecamatan	20.000.000	9 Kecamatan	120.000.000	9 Kecamatan	500.000.000	Dinas Sosial	KK R						
5	Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan (BSP)	Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan (BSP)				9 Kecamatan	20.000.000	9 Kecamatan	222.000.000	9 Kecamatan	908.000.000	Dinas Sosial	KK R						
6	Fasilitasi Penanganan Bencana	Jumlah Fasilitasi Penanganan Bencana				9 Kecamatan	25.000.000	9 Kecamatan	155.000.000	9 Kecamatan	645.000.000	Dinas Sosial	KK R						



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial					15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	75.000.000	Dinas Sosial	KKR	
		1	Koordinasi dan identifikasi lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	Jumlah Koordinasi dan identifikasi lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)			1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	5 Tahun	75.000.000	Dinas Sosial	KKR
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Peningkatan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)				42.240.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	1.362.240.000	Dinas Sosial	KKR	
		1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program keluarga harapan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan program keluarga harapan			1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	5 Tahun	125.000.000	Dinas Sosial	KKR
		2	Bimtek reguler pendamping dan operator PKH	Jumlah Peserta Bimtek reguler pendamping dan			70 Peserta	500.000.000	70 Peserta	500.000.000	70 Peserta	500.000.000	70 Peserta	500.000.000	350 Peserta	2.500.000.000	Dinas Sosial	KKR



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

				operator PKH																
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan	Terselesainya Semua Perkara yang Ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya				33.355.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		193.355.000	Dinas Sosial	KKR
		1	Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial				1 Tahun	33.355.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	40.000.000	5 Tahun	193.355.000	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	Pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku				26.700.000		26.700.000		26.700.000		26.700.000		26.700.000		133.500.000	Dinas Sosial	KKR
		1	x	Jumlah Peserta Bimtek Taruna Siaga Bencana				52 Peserta	26.700.000	52 Peserta	26.700.000	52 Peserta	26.700.000	52 Peserta	26.700.000	52 Peserta	26.700.000	260 Peserta	133.500.000	Dinas Sosial
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				28.537.050		33.599.850		Tidak Dianggarkan		Tidak Dianggarkan		Tidak Dianggarkan		117.936.500	Dinas Sosial	KKR
		1	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD				1 Dokumen	9.937.250	1 Dokumen	15.000.000	-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan	2 Dokumen	24.937.250	Dinas Sosial



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

		2	Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan				1 Tahun	18.599.850	1 Tahun	18.599.850	1 Tahun	18.599.850	1 Tahun	18.599.850	1 Tahun	18.599.850	5 Tahun	92.999.250	Dinas Sosial	KKR
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur				-	Tidak Dianggarkan		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				-	Tidak Dianggarkan	36 Stel	40.000.000	36 Stel	40.000.000	-	Tidak Dianggarkan	36 Stel	40.000.000	108 Stel	120.000.000	Dinas Sosial	KKR
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelolaan keuangan daerah					3.581.600		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		23.581.600	Dinas Sosial	KKR
		1	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Jumlah Penataan Aset pada SKPD				12 Bulan	3.581.600	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	60 Bulan	23.581.600	Dinas Sosial	KKR
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					25.950.000		87.002.800		100.000.000		100.000.000		100.000.000		412.952.800		



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

a Saing	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran				2 Dokumen	10.00 0.000	2 Dokumen	15.000 .000	2 Dokumen	15.000 .000	2 Dokumen	15.000 .000	2 Dokumen	15.000 .000	10 Dokumen	70.000 .000	Dinas Sosial	KK R
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				-	Tidak Dianggarkan	1 Dokumen	15.000 .000	1 Dokumen	15.000 .000	1 Dokumen	15.000 .000	1 Dokumen	15.000 .000	4 Dokumen	60.000 .000	Dinas Sosial	KK R
	3	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA SKPD				5 Dokumen	15.95 0.000	5 Dokumen	20.000 .000	5 Dokumen	20.000 .000	5 Dokumen	20.000 .000	5 Dokumen	20.000 .000	25 Dokumen	95.950 .000	Dinas Sosial	KK R
	4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)				-	Tidak Dianggarkan	1 Dokumen	12.286 .400	1 Dokumen	15.000 .000	1 Dokumen	15.000 .000	1 Dokumen	15.000 .000	4 Dokumen	47.286 .400	Dinas Sosial	KK R
	5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	Tidak Dianggarkan	1 Dokumen	12.430 .000	1 Dokumen	15.000 .000	1 Dokumen	15.000 .000	1 Dokumen	15.000 .000	4 Dokumen	57.430 .000	Dinas Sosial	KK R
	6	Penyusunan Standart Pelayanan Minimal	Jumlah Dokumen Standart Pelayanan				-	Tidak Dianggarkan	1 Dokumen	12.286 .400	1 Dokumen	20.000 .000	-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan	2 Dokumen	32.286 .400	Dinas Sosial	KK R





Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

5	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur				20 Unit	40.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	40.000.000	20 Unit	40.000.000	100 Unit	270.000.000	Dinas Sosial	KKR
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor				-	Tidak Dianggarkan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	Dinas Sosial	KKR						
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	60 Bulan	115.000.000	Dinas Sosial	KKR
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	60 Bulan	45.000.000	Dinas Sosial	KKR
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor				12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	60 Bulan	45.000.000	Dinas Sosial	KKR
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer				12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	60 Bulan	45.000.000	Dinas Sosial	KKR
11	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Jumlah Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat				12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	60 Bulan	775.000.000	Dinas Sosial	KKR



Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran				288.315.000		366.451.500		401.451.500		461.451.500		496.451.500		2.014.137.500		
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	67.200.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	60 Bulan	467.200.000	Dinas Sosial	KKR
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan	9 Unit Kendaraan Dinas	9 Unit Kendaraan Dinas	20.000.000	20.000.000	9 Unit Kendaraan Dinas	40.000.000	Dinas Sosial	KKR
		3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan			12 Bulan	110.482.500	12 Bulan	110.482.500	12 Bulan	110.482.500	12 Bulan	110.482.500	12 Bulan	110.482.500	60 Bulan	552.412.500	Dinas Sosial	KKR
		4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 Bulan	55.969.000	12 Bulan	55.969.000	12 Bulan	55.969.000	12 Bulan	55.969.000	12 Bulan	55.969.000	60 Bulan	279.845.000	Dinas Sosial	KKR
		5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	70.000.000	60 Bulan	240.000.000	Dinas Sosial	KKR
		6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	55.000.000	60 Bulan	170.000.000	Dinas Sosial	KKR



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

		7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bula n	4.740.000	12 Bula n	10.000.000	12 Bula n	10.000.000	12 Bula n	10.000.000	12 Bula n	10.000.000	60 Bula n	44.740.000	Dinas Sosial	KK R
		8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman				12 Bula n	14.940.000	12 Bula n	30.000.000	12 Bula n	40.000.000	12 Bula n	60.000.000	12 Bula n	75.000.000	60 Bula n	219.940.000	Dinas Sosial	KK R
		9	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				12 Bula n	100.000.000	12 Bula n	100.000.000	12 Bula n	100.000.000	12 Bula n	100.000.000	12 Bula n	100.000.000	60 Bula n	500.000.000	Dinas Sosial	KK R
		10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah				12 Bula n	60.000.000	12 Bula n	100.000.000	12 Bula n	100.000.000	12 Bula n	100.000.000	12 Bula n	100.000.000	60 Bula n	460.000.000	Dinas Sosial	KK R
		11	Pengelolaan Website	Jumlah Pengelolaan Website				12 Bula n	50.000.000	12 Bula n	10.000.000	12 Bula n	10.000.000	12 Bula n	10.000.000	12 Bula n	10.000.000	60 Bula n	90.000.000	Dinas Sosial	KK R
		12	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan	-	Tidak Dianggarkan	2 Dokumen	20.000.000	Dinas Sosial	KK R



Tabel 6.2.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA  
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-Rp 8	-9	-Rp 10	-11	-Rp 12	-13	-Rp 14	-15	-Rp 16	-17	-18
Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat			PERESENTAS E PENANGANAN PMKS/PPKS													
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Sosial yang mendapatkan pelayanan	n/a	100 %	Rp 43,004,999	100 %	Rp 177,320,090	100 %	Rp 40,391,931	100 %	Rp 107,513,365	100 %	Rp 368,230,385	Dinas Sosial	KKR	



araka t			kesejahteraan sosial													
	Kep mend agri 050-3708	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	n/a	1 Kegiatan	Rp 43,004,999						1 Kegiatan	Rp 43,004,999	Dinas Sosial	KKR	
	Kep mend agri 050-5889	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	n/a		2 Kegiatan	Rp 177,320,090		2 Kegiatan	Rp 40,391,931	2 Kegiatan	Rp 41,199,770	7 Kegiatan	Rp 301,916,790	Dinas Sosial	KKR
Kep mend agri 050-3708	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan	Jumlah Pekerja yang mengikuti sosialisasi/pe nyuluhan	n/a	20 Orang	Rp 43,004,999							20 Orang	Rp 43,004,999	Dinas Sosial	KKR	



		n Potensi Pekerja Sosial Masyaraka t Kewenanga n Kabupaten /Kota														
	Kep mend agri 050- 5889	Sub Kegiatan Peningkata n Kemampua n Potensi Pekerja Sosial Masyaraka t Kewenanga n Kabupaten /Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/K ota	n/a		-	20 Ora ng	Rp 69,997,450	20 Ora ng	Rp 30,185,557	20 Ora ng	Rp 30,789,268	20 Ora ng	Rp 130,972,275	Dina s Sosi al	K K R
		Sub Kegiatan Peningkata n Kemampua n Potensi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya	n/a	0	-	21 Le mb aga	Rp 107,322,640	23 Le mb aga	Rp 10,206,374	25 Lem baga	Rp 10,410,501	69 Lem bag a	Rp 127,939,515	Dina s Sosi al	K K R



			Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota													
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Penanganan Rehabilitasi Sosial	n/a	100 %	Rp 180,077,680	100 %	Rp 641,563,420	100 %	Rp 435,693,641	100 %	Rp 444,407,514	100 %	Rp 1,701,742,255	Dinas Sosial	KKR
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	n/a	100 %	Rp 148,168,126	100 %	Rp 543,615,430	100 %	Rp 371,238,022	100 %	Rp 378,662,782	100 %	Rp 1,441,684,360	Dinas Sosial	KKR



		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Luar Panti Sosial													
	Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	n/a	250 Orang	Rp 148,168,126						250 Orang	Rp 148,168,126	Dinas Sosial	KKR	
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan	n/a			250 Orang	Rp 543,615,430	250 Orang	Rp 163,310,440	250 Orang	Rp 166,576,649	750 Orang	Rp 873,502,519	Dinas Sosial	KKR



			Kabupaten/Kota													
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	0	-	0	-	60 Orang	Rp 53,409,194	60 Orang	Rp 54,477,378	120 Orang	Rp 107,886,572	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	0	-	0	-	120 Alat Bantu	Rp 154,518,388	120 Alat Bantu	Rp 157,608,756	240 Alat Bantu	Rp 312,127,144	Dinas Sosial	KKR



		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	n/a	100 %	Rp 31,909,554	100 %	Rp 97,947,990	100 %	Rp 64,455,619	100 %	Rp 65,744,731	100 %	Rp 260,057,894	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	n/a	300 Orang	Rp 31,909,554						300 Orang	Rp 31,909,554	Dinas Sosial	KKR	



		Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	HIV/AIDS dan NAPZA													
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a		300 Orang	Rp 97,947,990	300 Orang	Rp 64,455,619	300 Orang	Rp 65,744,731	900 Orang	Rp 228,148,340	Dinas Sosial	KKR	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	n/a	100 %	Rp 1,072,121,303	100 %	Rp 947,931,018	100 %	Rp 682,003,810	100 %	Rp 695,643,886	100 %	Rp 3,397,700,017	Dinas Sosial	KKR



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

		Kepmendagri 050-3708	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a	263.041 Jiw a	Rp 1,072,121,303						263.041 Jiw a	Rp 1,072,121,303	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a		62.000 Ora ng	Rp 947,931,018	60.000 Ora ng	59.000 Ora ng	Rp 695,643,886	181.000 Ora ng	Rp 2,325,578,714	Dinas Sosial	KKR	
		Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	n/a	263.041 Jiw a	Rp 716,787,719						263.041 Jiw a	Rp 716,787,719	Dinas Sosial	KKR



		Kep mend agri 050-5889	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	n/a			62.000 Orang	Rp 214,125,950	60.000 Orang	Rp 121,812,498	59.000 Orang	Rp 124,248,748	181.000 Orang	Rp 460,187,196	Dinas Sosial	KKR
		Kep mend agri 050-3708	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a	13 Kegiatan			Rp 355,333,584				13 Kegiatan		Rp 355,333,584	Dinas Sosial	KKR
		Kep mend agri 050-5889	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	n/a			38.000 Keluarga	Rp 733,805,068	38.000 Keluarga	Rp 110,698,458	38.000 Keluarga	Rp 112,912,427	114.000 Keluarga	Rp 957,415,953	Dinas Sosial	KKR



		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						1.000 Keluarga	Rp 449,492,854	2.000 Keluarga	Rp 458,482,711	3.000 Keluarga	Rp 907,975,565	Dinas Sosial	KKR
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Penanganan Bencana	n/a	100%	Rp 42,787,031	100%	Rp 160,728,270	100%	Rp 132,967,578	100%	Rp 135,626,930	498 Orang	Rp 472,109,809	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-3708	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	n/a	200 Jiw a	Rp 19,969,455							200 Jiw a	Rp 19,969,455	Dinas Sosial	KKR



		Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	n/a		200 orang	Rp 102,674,640	204 orang	Rp 83,243,372	208 orang	Rp 84,908,239	812 orang	Rp 270,826,251	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan untuk Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	n/a	200 Jiwa	Rp 19,969,455						200 Jiwa	Rp 19,969,455	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a		200 orang	Rp 102,674,640	204 orang	Rp 83,243,372	208 orang	Rp 84,908,239	612 orang	Rp 270,826,251	Dinas Sosial	KKR



		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	n/a	52 orang	Rp 22,817,576						52 orang	Rp 22,817,576	Dinas Sosial	KKR
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	n/a		2 Kali Rp 58,053,630		2 Kali Rp 49,724,206		2 Kali Rp 50,718,690	6 Kali Rp 158,496,526		Dinas Sosial	KKR	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	n/a	52 orang	Rp 22,817,576						52 orang	Rp 22,817,576	Dinas Sosial	KKR



		Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Taruna Siaga Bencana													
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	n/a		52 orang	Rp 58,053,630	52 orang	Rp 49,724,206	52 orang	Rp 50,718,690	52 Orang	Rp 158,496,526	Dinas Sosial	KKR	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	n/a	100 %	Rp 13,168,512	100 %	Rp 24,999,980	100 %	Rp 26,499,950	100 %	Rp 27,029,949	100 %	Rp 91,698,391	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-3708	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	n/a	9 Makam	Rp 13,168,512						9 Makam	Rp 13,168,512	Dinas Sosial	KKR	



	Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang di data	n/a			1 Laporan	Rp 24,999,980	1 Laporan	Rp 26,499,950	1 Laporan	Rp 27,029,949	3 Laporan	Rp 78,529,879	Dinas Sosial	KKR
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di Pelihara	n/a	9 Makam	Rp 13,168,512	0	-	-	-	-	1 Dokumen	13.168.512	Dinas Sosial	KKR	
		Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	n/a	0	-	1 Laporan	Rp 24,999,980	1 Laporan	Rp 26,499,950	1 Laporan	Rp 27,029,949	3 Laporan	Rp 78,529,879	Dinas Sosial



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	n/a	166 Dokumen	Rp 4,319,474,920	102 Lembag	Rp 2,760,969,820	102 Lembag	Rp 1,715,169,420	102 Lembag	Rp 1,749,472,808	472 Lembag	Rp 10,545,086,968	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-3708	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	n/a	166 Dokumen	Rp 4,319,474,920							166 Dokumen	Rp 4,319,474,920	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	n/a			102 Lembag	Rp 2,760,969,820	102 Lembag	Rp 1,715,169,420	102 Lembag	Rp 1,749,472,808	472 Lembag	Rp 6,225,612,048	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Mental Spiritual yang difasilitasi pengelolaannya	n/a	166 Dokumen	Rp 4,319,474,920							166 Dokumen	Rp 4,319,474,920	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah Lembaga Bina Mental Spiritual yang	n/a			102 Lembag	Rp 2,760,969,820	102 Lembag	Rp 1,715,169,420	102 Lembag	Rp 1,749,472,808	472 Lembag	Rp 6,225,612,048	Dinas Sosial	KKR



		050-5889	n Bina Mental Spiritual	difasilitasi pengelolaannya												
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	n/a	0	0	Rp -	0	Rp -	12 Orang	15.000.000	13 Orang	15.300.000	Dinas Sosial	KKR
			Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		0	0	Rp -	0	Rp -	12 Orang	15.000.000	13 Orang	15.300.000	Dinas Sosial	KKR



			Desa/Kelu rahan asal															
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulanga n Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangka n ke Desa/Kelu rahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurah an Asal Kewenangan Kabupaten/K ota		0		0	Rp -	0	Rp -	12 Ora ng	15.000.000	13 Ora ng	15.300.000		Dina s Sosi al	K K R



			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	100 %	Rp 3,463,592,335	100 %	Rp 4,445,715,151	100 %	Rp 4,429,909,946	100 %	#####	100 %	#####	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri 050-3708	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	8 Dokumen	Rp 49,544,654							8 Dokumen	Rp 49,544,654	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a			100 %	Rp 50,025,560	100 %	Rp 67,470,268	100 %	Rp 68,819,673	100 %	Rp 186,315,501	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri	Sub Kegiatan Penyusunan	Jumlah Dokumen yang tersusun	n/a	6 Dok	Rp 27,215,048							6 Dok	Rp 27,215,048	Dinas	KKR



	050-3708	n Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			ume n							ume n		Sosi al	
	Kep mend agri 050- 5889	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	n/a		5 Dok um en	Rp 27,215,030	5 Dok um en	Rp 29,908,423	5 Dok ume n	Rp 30,506,591	15 Dok ume n	Rp 87,630,044	Dina s Sosi al	K K R
	Kep mend agri 050- 3708	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	n/a	1 Dok ume n	Rp 7,443,202						1 Dok ume n	Rp 7,443,202	Dina s Sosi al	K K R



		Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a			1 Laporan	Rp 14,934,030	1 Laporan	Rp 18,056,809	1 Laporan	Rp 18,417,945	3 Laporan	Rp 51,408,784	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD yang disusun	n/a	1 Dokumen	Rp 14,886,404						1 Dokumen	Rp 14,886,404	Dinas Sosial	KKR	
		Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	n/a			4 Laporan	Rp 7,876,500	4 Laporan	Rp 19,505,036	4 Laporan	Rp 19,895,137	12 Laporan	Rp 47,276,673	Dinas Sosial	KKR



		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah													
	Kepmendagri 050-3708	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	100 %	Rp 2,307,139,052						100 %	Rp 2,307,139,052	Dinas Sosial	KKR	
	Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a			100 %	Rp 2,889,031,527	100 %	Rp 3,025,192,462	100 %	Rp 3,085,696,311	100 %	Rp 8,999,920,300	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pegawai yang Menerima Gaji	n/a	14 Bulan	Rp 2,288,891,386							14 Bulan	Rp 2,288,891,386	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a			22 Orang	Rp 2,877,288,737	22 Orang	Rp 2,953,750,368	22 Orang	Rp 3,012,825,375	56 Bulan	Rp 8,843,864,480	Dinas Sosial	KKR



		Kep mend agri 050-5889	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	n/a					12 Dokumen	Rp 54,387,206	12 Dokumen	Rp 55,474,950	24 Dokumen	Rp 109,862,156	Dinas Sosial	KKR
		Kep mend agri 050-3708	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	n/a	1 Dokumen					Rp 7,443,202			1 Dokumen	Rp 7,443,202	Dinas Sosial	KKR
		Kep mend agri 050-5889	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	n/a		1 Laporan		Rp 7,443,140	1 Laporan	Rp 9,816,270	1 Laporan	Rp 10,012,595	3 Laporan	Rp 27,272,005	Dinas Sosial	KKR



		Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD													
	Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	n/a	2 Dokumen	Rp 10,804,464						2 Dokumen	Rp 10,804,464	Dinas Sosial	KKR	
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	n/a			12 Laporan	Rp 4,299,650	12 Laporan	Rp 7,238,618	12 Laporan	Rp 7,383,390	36 Laporan	Rp 18,921,658	Dinas Sosial	KKR



			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
Kepmendagri 050-3708	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	100 %	Rp 24,171,000							100 %	Rp 24,171,000	Dinas Sosial	KKR
Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a			100 %	Rp 65,724,000	100 %	Rp 42,785,000	100 %	Rp 127,899,000	100 %	Rp 236,408,000	Dinas Sosial	KKR
Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan yang di ikuti	n/a	3 Orang	Rp 24,171,000							3 Orang	Rp 24,171,000	Dinas Sosial	KKR



		Perundang-undangan																
	Kepmendagri-050-5889	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	n/a			3 Orang	Rp 22,114,000		5 Orang	Rp 42,785,000		7 Orang	Rp 59,899,000	15 Orang	Rp 124,798,000	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri-050-5889	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a			1 Paket	Rp 43,610,000			Rp -		1 Paket	Rp 68,000,000	2 Paket	Rp 111,610,000	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri-050-3708	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	100 %			Rp 169,340,621							100 %	Rp 169,340,621	Dinas Sosial	KKR



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

		Kep mendagri 050-5889	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a		100 %	Rp 339,456,640	100 %	Rp 417,631,153	100 %	Rp 451,213,235	100 %	Rp 1,208,301,028	Dinas Sosial	KKR
		Kep mendagri 050-3708	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a	12 Bulan		Rp 58,937,621					12 Bulan	Rp 58,937,621	Dinas Sosial	KKR
		Kep mendagri 050-5889	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a		3 Paket	Rp 88,911,200	3 Paket	Rp 92,068,893	3 Paket	Rp 93,910,271	15 Komponen	Rp 274,890,364	Dinas Sosial	KKR
		Kep mendagri 050-3708	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	n/a	12 Bulan		Rp 11,198,000					12 Bulan	Rp 11,198,000	Dinas Sosial	KKR
		Kep mendagri	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	n/a		3 Paket	Rp 22,956,000	3 Paket	Rp 24,812,760	3 Paket	Rp 25,309,015	9 Paket	Rp 73,077,775	Dinas	KKR



	050-5889	n barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan yang Disediakan											Sosi al	
	Kep mend agri 050-3708	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	n/a	1095 eks empl ar	Rp 3,600,000						1095 ekse mpl ar	Rp 3,600,000	Dina s Sosi al	K K R
	Kep mend agri 050-5889	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	n/a		12 Dok um en	Rp 7,200,000	12 Dok um en	Rp 7,200,000	12 Dok ume n	Rp 7,200,000	36 Dok ume n	Rp 21,600,000	Dina s Sosi al	K K R
	Kep mend agri 050-3708	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	n/a	12 Bul an	Rp 95,605,000						12 Bul an	Rp 95,605,000	Dina s Sosi al	K K R



			dan Konsultasi SKPD													
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a			283 Laporan	Rp 193,022,000	283 Laporan	Rp 287,561,000	283 Laporan	Rp 293,312,220	849 Laporan	Rp 773,895,220	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-5889	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a			4 Paket	Rp 2,491,500	5 Paket	Rp 5,988,500	6 Paket	Rp 6,108,270	15 Paket	Rp 14,588,270	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-5889	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	0	-	14 Paket	Rp 24,875,940	0	Rp -	15 Paket	Rp 25,373,459	29 Paket	Rp 50,249,399	Dinas Sosial	KKR



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

		Kepmendagri 050-5889	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	0	-	-	-			12 Dokumen	36.000.000	12 Dokumen	36.000.000	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri 050-3708	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	36 unit	Rp 391,628,968							36 unit	Rp 391,628,968	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a			29 unit	Rp 517,987,124	8 unit	Rp 211,167,080	31 unit	Rp 474,091,058	104 unit	Rp 1,203,245,262	Dinas Sosial	KKR



		Kep mend agri 050-3708	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit yang Terpenuhi	n/a	1 Unit	Rp 36,805,000					1 Unit	Rp 36,805,000	Dinas Sosial	KKR	
		Kep mend agri 050-5889	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a		0	-			1 Unit	Rp 36,805,000	1 Unit	Rp 36,805,000	Dinas Sosial	KKR
		Kep mend agri 050-3708	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Unit yang Terpenuhi	n/a	19 Unit	Rp 36,617,588					19 Unit	Rp 36,617,588	Dinas Sosial	KKR	
		Kep mend agri 050-5889	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a		16 Unit	Rp 39,876,870			16 Unit	Rp 41,895,636	32 Unit	Rp 81,772,506	Dinas Sosial	KKR
		Kep mend agri	Sub Kegiatan Pengadaan	Jumlah Unit yang Terpenuhi	n/a	13 Unit	Rp 119,906,380					13 Unit	Rp 119,906,380	Dinas	KKR	



	050-3708	Peralatan dan Mesin Lainnya												Sosial	
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a		4 Unit	Rp 111,466,254	5 Unit	Rp 13,017,080	5 Unit	Rp 13,277,422	14 Unit	Rp 137,760,756	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang Terpenuhi	n/a	3 Unit		Rp 198,300,000					3 Unit	Rp 198,300,000	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a		3 Unit	Rp 198,450,000	3 Unit	Rp 198,150,000	3 Unit	Rp 202,113,000	9 Unit	Rp 598,713,000	Dinas Sosial	KKR



		Bangunan Lainnya														
	Kepmendagri 050-5889	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a			6 Unit	Rp 168,194,000		6 Unit	Rp 180,000,000	12 unit	Rp 348,194,000	Dinas Sosial	KKR	
	Kepmendagri 050-3708	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	12 Bulan	Rp 466,938,040						12 Bulan	Rp 466,938,040	Dinas Sosial	KKR	
	Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a			86 Kali	Rp 533,687,700	86 Kali	Rp 515,792,766	86 Kali	Rp 543,880,000	258 Kali	Rp 1,593,360,466	Dinas Sosial	KKR



		Kep mendagri 050-3708	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	12 Bulan	Rp 66,904,000					12 Bulan	Rp 66,904,000	Dinas Sosial	KKR	
		Kep mendagri 050-5889	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a			12 Laporan	Rp 66,704,000	12 Laporan	12 Laporan	Rp 66,904,000	36 Laporan	Rp 175,512,000	Dinas Sosial	KKR
		Kep mendagri 050-3708	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	12 Bulan	Rp 400,034,040					12 Bulan	Rp 400,034,040	Dinas Sosial	KKR	
		Kep mendagri 050-5889	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a			12 Laporan	Rp 466,983,700	12 Laporan	12 Laporan	Rp 473,888,766	12 Laporan	Rp 476,976,000	Dinas Sosial	KKR



		Umum Kantor														
	Kepmendagri 050-5889	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	1 Unit	Rp 54,830,000	30 unit	Rp 49,802,600	39 unit	Rp 135,146,500	40 unit	Rp 136,849,430	110 unit	Rp 376,628,530	Dinas Sosial	KKR
	Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	1 Unit	Rp 38,750,000							1 Unit	Rp 38,750,000	Dinas Sosial	KKR



		Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a		0	-	1 Unit	Rp 50,000,000	1 Unit	Rp 50,000,000	2 Unit	Rp 100,000,000	Dinas Sosial	KKR
		Kepmendagri 050-3708	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	n/a	12 Bulan	Rp 8,760,000						12 Bulan	Rp 8,760,000	Dinas Sosial	KKR



		Kepmendagri 050-5889	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a			16 Unit	Rp 9,760,000	16 Unit	Rp 14,600,000	16 Unit	Rp 14,892,000	48 Unit	Rp 39,252,000	Dinas Sosial	KKR
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	12 Bulan			Rp 7,320,000					12 Bulan	Rp 7,320,000	Dinas Sosial	KKR



		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	0	-	13 Unit	Rp 9,490,000	14 Unit	Rp 14,640,000	15 Unit	Rp 14,932,800	42 Unit	Rp 39,062,800	Dinas Sosial	KKR
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	n/a			0	-	1 Unit	Rp 24,744,000	1 Unit	Rp 25,238,880	2 Unit	Rp 49,982,880	Dinas Sosial	KKR
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	n/a			1 Unit	Rp 30,552,600	7 Unit	Rp 31,162,500	7 Unit	Rp 31,785,750	15 unit	Rp 93,500,850	Dinas Sosial	KKR



		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	n/a	-	-	100 %	Rp 14,724,717	100 %	Rp 15,019,211	100 %	Rp 29,743,928	Dinas Sosial	KKR
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	-	-	1 Dokumen	Rp 5,642,626	1 Dokumen	Rp 5,755,479	2 Dokumen	Rp 11,398,105	Dinas Sosial	KKR
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	-	-	1 Laporan	Rp 5,821,563	1 Laporan	Rp 5,937,994	2 Laporan	Rp 11,759,557	Dinas Sosial	KKR



Rencana Strategis (Renstra) Perubahan  
Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	-	-	1 Dokumen	Rp 3,260,528	1 Dokumen	Rp 3,325,739	2 Dokumen	Rp 6,586,267	Dinas Sosial	KKR
--	--	--	--	--	-----	---	---	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.

5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 **”Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”**, Misi Kabupaten Kubu Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)  
Tujuan 1 : Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa  
Sasaran : Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :





2	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( Good and Clean Governance )	T	1	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Berwibawa	1	Indeks Reformasi Birokrasi	S	1	1	Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	20%	80%	85%	90%	100%	100%
---	--	---	---	---	---	----------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------	-----	-----	-----	-----	------	------



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Sosial yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, kemana arah yang harus dituju organisasi dan bagaimana cara/strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2020 – 2024 menjadi acuan bagi seluruh unsur/bagian yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, karena :

1. Merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan mengukur seberapa besar pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2019 – 2024.
2. Memudahkan pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial pada akhir tahun 2024, karena dapat segera dilakukan perbandingan terbalik antara rencana dan realisasi dengan menggunakan lima indikator kinerja, yaitu : *input, output, outcomes, benefit* dan *impact*.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dan alokasi dana anggaran melalui pendekatan kinerja serta prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan kehematan serta rasionalisasi, agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, Dinas Sosial juga perlu menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan yang akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Kubu Raya, 2022  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kubu Raya

  
**Anusapati, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660515 198807 1 004